

KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN NAGAN RAYA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN NAGAN RAYA

T. Andriansyah^{*1}, Yusrizal², dan Niswanto³

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala

Abstrak

Dinas Pendidikan Nagan Raya adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: perencanaan program, mekanisme pelaksanaan program, evaluasi program dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dinas Pendidikan membuat kebijakan sesuai dengan hasil raker atau aturan yang ada di Dinas Pendidikan Nagan Raya. (2) Mekanisme pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya atau melalui manajemen yang baik yaitu dengan cara melaksanakan *planning, organizing, actuating dan controlling*. (3) Evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Nagan Raya dilaksanakan dengan komprehensif dengan berfokus pada setiap masalah atau kesenjangan yang terjadi pada setiap program. (4) Hambatan utama yang ditemukan Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam memberikan kontribusinya pendidikannya adalah *Political Will* dari Bupati Nagan Raya serta defisitnya anggaran daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Dinas Pendidikan, Mutu, Pendidikan

Abstract

The Nagan Raya Education Office is the implementing element of regional autonomy in government affairs in the education sector. The purpose of this research is to determine: program planning, program implementation mechanisms, program evaluation and the obstacles faced by the Education Office in improving the quality of education in primary schools in Nagan Raya District. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The research results show that: (1) The Education Office makes policies in accordance with the results of the work meeting or existing regulations in the Nagan Raya Education Office. (2) The mechanism of program implementation that is implemented by the Education Department Nagan Raya is executed in accordance with the policies made by the Department of Education Nagan Raya or through good management is by way of carrying out the *planning, organizing, actuating and controlling*. (3) The evaluation carried out by the Nagan Raya Education Office is carried out comprehensively by focusing on any problems or gaps that occur in each program. (4) The main obstacle that the Nagan Raya Education Office finds in contributing to its education is the *Political Will* of the Nagan Raya Regent and the deficit in the regional budget.

Keywords : Education Service Policy , Quality , Education

*correspondence Address

E-mail: t.andriansyah82@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. Pendidikan yang dapat menjadikan bangsa yang berkualitas dan berakhlak karisma tidak dapat dilepaskan dari peran serta pemerintah dalam mendesain dan membentuk suatu sistem yang bijak sehingga pemerintah melalui organisasi-organisasi yang mengurus pendidikan sebagai pelaku dan pemegang kunci keberhasilan sebuah pendidikan dapat menjalankan fungsinya dengan tepat.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini manajemen kinerja atau sering dikenal sebagai *performen tmanagement* berbicara tentang bagaimana mengelola kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kelangsungan hidup sebuah organisasi ditentukan oleh keberhasilannya mencapai tujuan organisas. Dengan demikian manajemen kinerja merupakan kebutuhan setiap organisasi untuk menjalankannya. Manajemen kinerja berorientasi pengelolaan proses.

Pelaksanaan kerja dan hasil atau prestasi kerja. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi, serta cara-cara bertindak sebagai pemimpin. Namun ada juga yang mendefinisikan kebijakan merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan adalah seperangkat tindakan pemimpin yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pemimpin.

Pengertian lain dari kebijakan adalah keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam organisasi. Kebijakan menjadi rujukan utama para anggota organisasi dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang secara resmi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, diterangkan bahwa

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah (pusat), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Urusan pemerintah dibagi sedemikian rupa antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dijelaskan pula selanjutnya yaitu pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Selanjutnya pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Federick (Agustino Leo, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Menurut Budi Winarno (2007:18) "kebijakan hendaknya dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan".

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, telah terjadi perkembangan pemikiran sekuler yang berhadapan dengan perkembangan pemikiran Islam. Secara terbuka dapat dilihat, bahwa pengaruh pemikiran paham sekuler telah masuk ke dalam dunia pendidikan nasional, seperti disebut al-Jawi, "sesungguhnya diakui atau tidak, sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang sekular-materialistik".

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tua dan komunitas. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: (1), desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan (2), desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah.

Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan pimpinan adalah seperangkat tindakan pemimpin yang di desain untuk mencapai apa hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pemimpin yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi.

Di dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan-kebijakan antara lain melalui visi dan misi yang digariskan pemimpin. Visi mengandung pengertian ke arah mana organisasi selama masa kepemimpinan sebagaimana telah ditentukan. Sedangkan misi adalah bagaimana mencapai visi yang telah ditentukan. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus ditangani, dikendalikan dan dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga tugas-tugas dapat dilakukan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan kata lain, pemimpin menjalankan fungsi manajemen secara efektif dan efisien untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkannya. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan seorang pemimpin dalam pelaksanaannya harus terukur dalam pencapaian hasilnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu: berdasarkan sasaran/target yang akan dicapai; berdasarkan waktu yang tersedia; berdasarkan biaya yang tersedia; serta berdasarkan keterampilan dan kemampuan pegawainya dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam hal ini unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan di daerah ialah Dinas pendidikan sebagaimana dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas pendidikan sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, Dinas pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsinya antara lain sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; (2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan; (4) Pelaksanaan administrasi dinas

pendidikan dan Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan membuat program, bahwa pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan Nagan Raya merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah, kebijakan- kebijakan yang di laksanakan oleh Kepala Dinas merupakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. Dinas pendidikan Nagan Raya menyusun program untuk tahun 2020 disusun pada bulan juni 2019 yaitu bersifat rencana kerja (RENJA), setelah itu dilanjutkan ke Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), selesai dari Bappeda dilanjutkan lagi menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan visi dan misi Dinas kemudian baru dibuat ke dalam rencana kerja anggaran (RKA) setelah itu sidang Kebijakan Umum Anggaran (KUA), selesai KUA dilanjutkan dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah sidang KUA dan KPPS baru ditetapkan berapa jumlah plafon anggaran dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di akhir bulan Desember 2019 di awal Januari 2020 DPA tersebut sudah siap digunakan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang peneliti lakukan bahwa kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar merupakan upaya kerja sama antar Dinas yang terkait. Pada dasarnya, Dinas Pendidikan memberi masukan, penilaian atau pertimbangan yang tujuan akhirnya bisa memotivasi kinerja guru dalam memajukan pendidikan. seperti pemberian *reward and punishment* kepada tenaga kependidikan baik guru maupun siswa sebagai penerima layanan jika itu memang dibutuhkan, tentunya sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

Dari permasalahan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada banyak kegiatan atau pekerjaan Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam rangka menjalankan wewenang dan tugasnya untuk memberikan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Kabupaten Nagan Raya. Di samping itu, melalui observasi awal, peneliti memperhatikan ada beberapa perencanaan program Dinas Pendidikan Nagan Raya yang sudah terealisasi dan program yang akan direalisasi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam memberikan pelayanan kepada tenaga kependidikan dan juga melaksanakan wewenangnya sebagai Dinas penjamin mutu pendidikan Nagan Raya tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sugiyono (2015:37) memaparkan bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara historis, sehingga data-data yang akan diteliti berfokus kepada data, program, masalah dan fenomena masa lalu. Menurut Yusuf (Ferdiansyah, 2015:13), “penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat dan objektif suatu kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif”.

Pada penelitian ini, peneliti meletakkan fokus penelitian pada ruang lingkup kebijakan Dinas Pendidikan Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yaitu dari bulan maret sampai dengan bulan Juni. Subjek penelitian disini adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid Dinas Pendidikan Nagan Raya.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan besar dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendekati topik tersebut, mengumpulkan data, hingga menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan alat penelitian lainnya, seperti: lembar pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi.

Uji kredibilitas ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang akan ditampilkan nantinya benar-benar kredibel, valid dan dapat menghasilkan suatu data yang tidak diragukan. Moleong (2012:130) menjelaskan “Uji kredibilitas data adalah suatu proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi”.

Pada penelitian ini, penulis menempuhnya dengan mengumpulkan sejumlah data kualitatif (hasil pengamatan dan wawancara) antara masing-masing subjek penelitian, yaitu Kepala Dinas, Sekdis dan Kabid. Kemudian penulis dapat menganalisis hasil wawancara dan menyesuaikannya dengan hasil studi dokumentasi. Pada akhirnya, dapat ditarik

sebuah kesimpulan. Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian karena tujuan akhir dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data yang ingin diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Dalam melaksanakan penelitian ini, Sugiyono (2013:156) menyatakan bahwa: “penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Tahapan pelaksanaan penelitian kualitatif adalah (1) tahapan orientasi, (2) tahapan eksploitasi dan (3) tahap *member check*”

Setelah pengumpulan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan pola kualitatif. Dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) yaitu (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Mengambil kesimpulan lalu diverifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa: Dinas pendidikan Nagan Raya menyusun program untuk tahun 2020 disusun pada bulan juni 2019 yaitu bersifat rencana kerja (RENJA), setelah itu dilanjutkan ke Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), selesai dari Bappeda dilanjutkan lagi menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan visi dan misi Dinas kemudian baru dibuat ke dalam rencana kerja anggaran (RKA) setelah itu sidang Kebijakan Umum Anggaran (KUA), selesai KUA dilanjutkan dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah sidang KUA dan KPPS baru ditetapkan berapa jumlah plafon anggaran dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di akhir bulan Desember 2019 di awal Januari 2020 DPA tersebut sudah siap digunakan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menerangkan membuat rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam UU No 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat Visi Misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah di susun mengacu kepada RPJP Nasional.

Sedangkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Daerah), itu berlaku 5 tahun sekali sesuai dengan kebijakan dari Dinas BAPPEDA dan rancangan kerja pemerintah jangka pendek yang berlaku setahun sekali.

Dalam raker setiap bidang memaparkan perencanaan yang akan dilaksanakan pada semester yang akan datang, Kabid Dikdas memprogramkan tentang peningkatan pendidikan dan kependidikan di setiap sekolah dasar sesuai dengan Juknis sedangkan Kabid Gtk memprogramkan tentang kinerja guru ataupun peningkatan kapasitas guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah sesuai Juknis, Kabid Paud membina guru atau peningkatan guru dalam memberikan apresiasi kepada peserta didik dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan juga menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), Sekretaris mengatur atau merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan dan perencanaan evaluasi dan pelaporan. Dari masing-masing bidang mempunyai peran masing masing bidang baik Kasie, Staf sesuai dengan juknis baik dari Kementerian maupun Perbub di Daerah,

Dinas pendidikan dalam raker setiap bidang memaparkan perencanaan yang akan dilaksanakan dari semester ganjil dan semester genap dalam satu tahun kerja Dinas. Merevisi visi dan misi Dinas pendidikan apabila dibutuhkan sesuai perkembangan dunia pendidikan dewasa ini. Terwujudnya system pendidikan yang islami pada semua jenjang dan lembaga pendidikan. Meningkatnya mutu pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Untuk mewujudkan visi tersebut dinas pendidikan Nagan Raya selalu berusaha mempersiapkan lulusan yang cerdas, intelektual, Emosional, Spiritual dan berkarakter madani.

Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan Yang Dibuat Oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SD

pelaksanaan kebijakan yang dibuat Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar dengan cara merekrut Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bekerja sama dengan pengawas sekolah dalam mengawasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dinas Pendidikan juga melaksanakan koordinasi dengan kepala Sekolah melalui rapat rutin mengenai permasalahan yang ada di Sekolah. Dinas Pendidikan melalui bidang guru dan tenaga kependidikan juga melakukan pembinaan baik guru yang bermasalah maupun guru yang berprestasi.

Dalam pengambilan kebijakan oleh Dinas pendidikan tetap berorientasi PP No. 19 Tahun 2005, sehingga pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan tidak melenceng dari aturan yang ada. Dinas Pendidikan dalam merumuskan kebijakan selalu melibatkan pihak-pihak terkait baik dalam intansi Dinas Pendidikan maupaun diluar intansi, yang berhubungan dan terkait dengan pendidikan. Misalnya MPD, DISPORA, dan Dinas yang terkait dengan keuangan.

Dengan demikian seluruh program kerja Dinas Pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita pendidikan untuk menuju pendidikan yang berkualitas umumnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Maka dari itu setiap rumusan kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan dapat diterapkan pada setiap unit sekolah, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan Kabupaten Nagan Raya. Pelaksanaan yang diadakan setiap kegiatan jam kerja yaitu kunjungan ke sekolah dengan sebulan sekali para pengawas akan melakukan observasi atau kunjungan kelas ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nagan Raya untuk memantau peristiwa atau kejadian yang terjadi selama proses belajar mengajar, juga untuk melihat kinerja kepala sekolah dan guru dalam menjalankan sistem pendidikan yang ada.

Evaluasi kebijakan pelaksanaan program Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu Pendidikan SD

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan dari Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang terkait, perlu adanya sebuah aturan untuk melakukan pengawasan dan control pada setiap unit sekolah. Dinas Pendidikan melibatkan bidang yang menangani Pendidikan terutama Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pembantuan (PKP), Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) dan pengawas Sekolah. Sehingga mampu mengawasi proses belajar mengajar serta mengevaluasi kinerja Guru maupun Kepala Sekolah. Dinas selalu melakukan evaluasi dan juga memantau segala kegiatan yang akan direncanakan dengan bentuk tim dan kelompok. Nantinya akan di adakan penilaian dan juga evaluasi bidang untuk menganalisis keadaan dan perubahan yang sedang dihadapi baik itu hambatan dan perubahan yang baik dan signifikan dalam membuat suatu kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah di Kabupaten Nagan Raya khususnya pada Sekolah Dasar.

Peran kepala dinas cukup saja dengan mengambil langkah dan kebijakan untuk di telaah bersama seperti runding antar staf dan sekretaris Dinas Pendidikan untuk meninjau hasil dari pada evaluasi tersebut, peran sekretaris daerah juga disini terlibat dengan mengawasi kepala Dinas untuk meninjau dan melihat kebijakan- kebijakan apa saja yang di

ciptakan oleh kepala Dinas, apakah kebijakan tersebut berbenturan dengan peraturan daerah dan juga qanun yang ada di aceh.

Kepala Dinas melakukan evaluasi kerja setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh personilnya dengan memberikan masukan arahan dan juga monitoring kepada pengawas dan juga kepala bagian lainnya, dengan selalu melakukan pantau kepada setiap staf kerja untuk melakukan evaluasi kerja yang sudah ditargetkan dalam beberapa kasus dan kendala. Dengan adanya evaluasi kerja sesama team maka akan mendapatkan hasil yang sudah didapatkan di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan selalu melihat dan mengevaluasi segala program sudah ditetapkan oleh Dinas pendidikan dan kegiatan tersebut dilakukan untuk dilaksanakan dan setelah itu nanti akan di evaluasi. Dan juga kepala Dinas akan melakukan monitoring untuk proses kelengkapan administrasi, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan. Dengan adanya evaluasi maka dapat mengantisipasi dan juga bisa mengetahui kendala dan tindakan apa yang akan kita lakukan nanti. Kepala Dinas juga membentuk program kedinasan lainnya dengan mengevaluasi kinerja karyawan dan juga setiap kinerja yang ada di sekolah untuk ditinjau dan evaluasi sebagai bentuk hasil dilapangan setelah itu ditinjau lagi dengan bentuk kegiatan yang sudah direncanaka oleh kepala Dinas.

Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu pendidikan SD.

Kendala dan hambatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tentunya ada, mulai dari kendala dalam membuat kebijakan, program, melaksanakan evaluasi, tentunya butuh peran kepemimpinan langsung dari kepala Dinas Pendidikan Aceh mulai dari sarana dan prasarana, mutu pendidikan, kinerja, pelaksanaan, evaluasi kerja dan juga guru yang sudah masuk lanjut usia. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya yaitu: Masih kurangnya tenaga pengajar kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dan juga dukungan lingkungan terutama social budaya, factor ekonomi juga sangat mempengaruhi tingkat pendidikan anak, tingkat kualifikasi pendidikan guru yang masih kurang pada bidang study tertentu dan juga penerapan manajemen kepala sekolah dan guru disetiap sekolah belum memenuhi standar pelayanan pendidikan, disamping itu Dinas Pendidkan belum adanya pembinaan khusus terhadap guru baik guru yang bermasalah maupun guru yang berprestasi sehingga Dinas Pendidikan perlu wadah atau bidang konseling khusus tentang pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

Hasil pemaparan diatas oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa setiap hambatan yang didapatkan oleh Dinas Pendidikan selalu mendapatkan hasil yang lebih baik, berkat kerja sama antara organisasi yang berkepentingan dalam distribusi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Kabupaten Nagan Raya. Dinas pendidikan juga memberikan pengadaan semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti layanan akses internet, gangguan listrik, dan lain lainnya. Karena di Nagan Raya ada sekolah-sekolah yang belum memiliki akses internet yang daerah nya terpencil, kepala Dinas beserta jajarannya membuat usulan ke pemda daerah untuk memonitoring terkait menyangkut masih adanya sekolah yang masih belum memiliki akses internet, seperti kepala daerah Bupati, Kapolres, Dandim, Perwakilan Kejari, Kankemenag, dan unsur Forkopimda lainnya.

Menyangkut masih adanya sekolah yang masih belum memiliki akses internet pihak Pemerintah daerah akan terus mengupayakan kelengkapan disetiap sekolah kedepannya, supaya proses belajar mengajar disetiap sekolah berjalan dengan lancar seperti sekolah-sekolah lain sehingga pelaksanaan ujian nasional berbasis computer (UNBK) berjalan dengan efisien dan efektif.

SIMPULAN

1. Kebijakan Dinas pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar di Kabupaten Nagan Raya. Dalam kebijakan Dinas Pendidikan perlu adanya peningkatan kualitas guru sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian Dinas Pendidikan setiap tahun melaksanakan kegiatan pelatihan guru, selain itu Dinas Pendidikan juga melakukan pengawasan dan memonitoring baik dalam proses pembelajaran maupun administrasi kepala Sekolah sesuai dengan delapan standar.
2. Pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar, sebelum melakukan pelaksanaan tentang kebijakan Dinas Pendidikan selalu mengadakan rapat kerja (raker) terlebih dahulu sebelum membahas tentang program pelaksanaan apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas untuk kedepan, jadi Dinas Pendidikan menginstruksikan kepada seluruh bidang atau staf yang ada di Dinas Pendidikan agar selalu objektif dan efektif dalam bekerja, kepala Dinas juga menginstruksi kepada pengawas sekolah untuk turun kelapangan agar selalu memantau dan menginstruksikan kepala sekolah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Kepala dinas juga memantau dan memonitoring kegiatan

bawahan setiap bagian seperti bagian keuangan salah satunya dinas akan pantau karena salah satu kebutuhan untuk anggaran dan dana ada di dinas akan di acc setiap kebutuhan sekolah, dinas pendidikan dalam upaya menfalitasi peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Kabupaten Nagan Raya yaitu kepala dinas pendidikan turun langsung, dan membentuk *teamwork* atau *team teaching* guru dan melibatkan MGMP yang pada Sekolah Dasar di Kabupaten Nagan Raya.

3. Evaluasi kebijakan pelaksanaan program Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar, dinas pendidikan selalu melakukan evaluasi dan juga memantau segala kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh dinas dengan cara membentuk tim dan kelompok. Untuk kedepan Nantinya dinas pendidikan akan diadakan penilaian dan juga evaluasi bidang untuk menganalisis keadaan dan perubahan yang sedang dihadapi baik itu hambatan dan perubahan yang baik dan signifikan dalam membuat suatu kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah di Kabupaten Nagan Raya khususnya pada Sekolah Dasar.
4. Hambatan yang di hadapi dinas pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Kabupaten Nagan Raya yaitu keterbatasannya inprastruktur, jauh dari perkotaan dan lainnya. Secara umum banyak sekali hambatan yang terjadi di sekolah dasar terutama daerah yang paling terpencil ataupun daerah yang paling tertinggal dari pada daerah-daerah yang lain seperti sekolah dasar Negeri 2 Beutong Ateuh. Sedangkan di SD Negeri 2 Beutong Ateuh contohnya listrik dan internet jadi listrik tidak sama dengan dikota karena listrik dibeutong ateuh belum maksimal bagus. Kemudian masalah internet memang di beutong ateuh tidak ada hubungan jaringan internet jadi untuk hubungan dari luar itu sangat susah. Untuk solusi sekolah Cuma bisa memperbaiki yang bisa diperbaiki oleh sekolah, kalau masalah besar seperti pengadaan listrik yang bagus itu biar pemerintah daerah yang akan memperbaiki,

SARAN

1. Kebijakan Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar yang di buat oleh kepala dinas, dari hasil raker dinas pendidikan Nagan Raya, dengan adanya kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar maka pendidikan yang ada di Kabupaten Nagan Raya akan terarah yang lebih bagus, seperti kebijakan menuntut kepada kepala sekolah yang belum memiliki CAKEP supaya

memiliki CAKEP, guru yang kurang disiplin dalam bertugas atau jarang masuk ada pemotongan uang tunjangan (TC), dan juga diperlambat naik pangkat dan lainnya.

2. Pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar beserta jajarannya yang ada di dinas, maka setiap pelaksanaan yang dibuat oleh dinas pendidikan baik pelaksanaan program mutu pendidikan itu harus dipertahankan oleh dinas dan bekerja sama dalam memenuhi kepentingan yang dibutuhkan oleh sekolah baik sarana dan prasarana ataupun kebutuhan lainnya, tujuannya agar dalam proses belajar mengajar dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif dan efisien yang diharapkan oleh sekolah tersebut.
3. Evaluasi kebijakan pelaksanaan program dinas pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar selalu melakukan evaluasi kerja oleh kepala dinas setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh personilnya dengan memberikan masukan arahan dan juga monitoring kepada pengawas dan juga kepada bagian lainnya, dengan selalu melakukan pantauan kepada setiap staf kerja untuk melakukan evaluasi kerja yang sudah di targetkan. Dengan adanya evaluasi kerja sesama team maka akan mendapatkan hasil yang sudah di dapatkan di lapangan, kepala dinas juga memberikan wewenang kepada Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk bekerja sama terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, dan juga menambah promosi sekolah agar dapat diketahui oleh masyarakat luar dan perlu mensosialisasikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sekolah.
4. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar, kepala Dinas Pendidikan dalam menangani hambatan tentang peningkatan mutu pendidikan selalu mencari jalan keluar atau solusi yang lebih baik. Baik hambatan struktural maupun hambatan dari guru sekolah tersebut, yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang dari Dinas Pendidikan, pengawas dan komite sekolah dalam membimbing guru itu harus lebih jeli atau egresif, begitu juga dalam hal penanganan sekolah dan lebih memperhatikan sekolah, lebih aktif turun kelapangan serta tidak membiarkan permasalahan yang terjadi di sekolah seperti sarana dan prasarana yang ada di sekolah, apabila ada peralatan sekolah yang di butuhkan rusak atau terbengkalai di sekolah maka pihak dinas perlu melanjutkan permasalahan yang terjadi pada pemerintah dengan membuat tim percepatan atau panitia pelelangan pengadaan barang dan jasa yang ada di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin dan Hendra. (2018). *Fungsi Manajemen dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*. [online] Volume 2, Nomor 1. Tersedia: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/pub/article/download/10037/7986>
- Badrudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Darodjat dan Wahyudhiana. (2015). *Model Evaluasi Program Pendidikan*. [online] Volume 14, Nomor 1. Tersedia: <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1665/1410>
- Fadhli, Muhammad. (2017). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. [online] Volume 1, Nomor 02. Tersedia: <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JSMPI/article/view/295>.
- Ferdiansyah. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor: Herya Media
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustari, Mohamad dan Taufiq Rahman. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafiika Persada
- Rifa'i, Muhammad. (2019). *Manajemen Organisasi Pendidikan*. Medan: CV Humanis
- Rusniati. (2015). *Pendidikan Nasional Dan Tantangan Globalisasi*. [online] Volume 16, Nomor 1, Tersedia: <https://media.neliti.com/media/publications/136840-ID-pendidikan-nasional-dan-tantangan-global.pdf>
- Sarinah. (2017). *Pengantar Manajemen*. DEEPPUBLISH: Yogyakarta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Syamsuddin. (2017). *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. [online] Volume 1, Nomor 1. Tersedia: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/download/4084/3773>
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Triwiyanto, T. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Utami, Ima Wahyu Putri dan Ichsan Anshori. (2018). *Pengantar Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang: *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas